

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 04082501081630002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SANJUNGAN EMAS MULIA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0408250108163

3. Alamat Kantor : WISMA SUNTER MITRA JALAN YOS SUDARSO MITRA SUNTER

BOULEVARD LANTAI 4 NOMOR 04. Desa/Kelurahan Sunter Java. Kec.

Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,

: 62014 - Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain

Kode Pos: 14360

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 081316820083

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

: WISMA SUNTER MITRA JL. YOS SUDARSO MITRA SUNTER 7. Lokasi Usaha

BOULEVARD LANTAI 4 NO. 04, Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,

Kode Pos: 14360

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 4 Agustus 2025

a.n. Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 September 2025



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 04082501081630002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
62014	Aktivitas	Menengah	Persyaratan:	Pernyataan	Kementerian	Selama
	Pengembangan	Rendah		Mandiri	Komunikasi	Pelaku
	Teknologi		Kewajiban:		dan Digital	Usaha
	Blockchain		- Memenuhi standar aktivitas pengembangan			menjalankan
			teknologi Blockchain;			kegiatan
			- Menyerahkan perencanaan / Roadmap teknologi			usaha
			Blockchain termasuk rencana menerapkan aktivitas			
			usaha lainnya kepada Menteri yang			
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			
			komunikasi dan informatika;			
			- Pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu)			
			tahun sekali dan/atau jika terjadi perubahan mengenai			
			perkembangan project kepada Menteri yang			
			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			
			komunikasi dan informatika.			

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.